

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

Agus Cahaya Kencana Adi Putra
NPP. 30.1038

Asdaf Kota Denpasar, Provinsi Bali
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: aguscahaya57@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Helwani., S.Ag, M.Pd.I

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : The implementation of the KOTAKU Program in Denpasar City has been implemented since 2016 until now but there are still problems that have not been resolved, therefore it is necessary to evaluate the implementation of the KOTAKU Program. **Objective :** to describe and analyze the implementation of the City Without Slums program, inhibiting factors and efforts made to overcome these factors. **Methods :** This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data. The informant determination technique in this study used purposive sampling. Based on this research study, it uses policy evaluation theory according to William N. Dunn (2013). **Results :** The results showed that of the 6 indicators, namely effectiveness regarding program targets/achievements had not been achieved, efficiency had gone well according to the provisions, responsiveness was considered to have achieved good results, adequacy in accordance with the adequacy of funds and time had not gone well, accuracy had gone well and also the alignment dimensions have been going well. **Conclusions :** The implementation of the KOTAKU Program in Denpasar City has been going well, but there are still a number of indicators that need to be improved. In order to improve program implementation, it is suggested that implementers be more active in building cooperation in the implementation of the KOTAKU Program.

Keywords: Evaluation; City Without Slums; Program Implementation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar telah terlaksana sejak tahun 2016 hingga kini namun masih ada permasalahan yang belum terselesaikan, oleh karena itu perlu adanya evaluasi pelaksanaan Program KOTAKU **Tujuan :** untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh, faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor tersebut **Metode :** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. **Hasil :** Berdasarkan kajian penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N.

Dunn (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 indikator yaitu efektifitas mengenai target/capaian program belum tercapai, efisiensi sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan, responsivitas dinilai sudah mencapai hasil yang baik, kecukupan sesuai dengan kecukupan dana dan waktu belum berjalan dengan baik, ketepatan sudah berjalan dengan baik dan juga dimensi perataan sudah berjalan dengan baik. Ada juga kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program tersebut yaitu status lahan pada kawasan kumuh yang ada di lahan sewa serta terkait kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan swasta hanya ada anggaran dari pemerintah daerah, serta dari tingkat kesadaran masyarakat yang berada di lahan sewa cenderung tak acuh terhadap keadaan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik akan tetapi masih ada beberapa indikator yang perlu di perbaiki. Guna meningkatkan pelaksanaan program disarankan pelaksana lebih aktif untuk membangun kerjasama dalam pelaksanaan Program KOTAKU.

Kata kunci: Evaluasi; Kota Tanpa Kumuh; Pelaksanaan Program

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal ini dilihat dari jumlah dan kepadatan penduduk di Indonesia terus bertambah setiap harinya. Pertambahan penduduk diiringi dengan arus urbanisasi yang pesat membuat semakin sulitnya pemenuhan kebutuhan perumahan dan tempat tinggal. Hal tersebut di sebabkan karena lahan di wilayah perkotaan mulai terbatas untuk membangun permukiman yang layak huni dan sesuai dengan kriteria persyaratan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan total daratan wilayah Indonesia seluas 1,9 juta km², maka jumlah kepadatan penduduk di Indonesia adalah 141 jiwa per km².

Beranjak dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan laporan “Informasi Statistik Insfrastuktur PUPR 2020”. Menurut laporan tersebut, 7.055 kota yang diprioritas oleh Kementerian PUPR dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan. Sebanyak 1.043 kota masuk ke dalam kategori “kumuh berat” dengan luas uji verifikasi 8.724,61 ha, sebanyak 1.754 kota masuk kedalam kategori “kumuh sedang” dengan luas 14.135,89 ha dan 1.902 kota masuk ke dalam kategori “kumuh ringan” dengan luas 12.154,81 ha. Terakhir, 2.456 kota yang memiliki luas sebesar 9,292,83 ha masuk kategori tingkat kumuh yang tidak termasuk penanganan prioritas.

Permukiman kumuh adalah kawasan yang tidak layak huni karena letak bangunan yang tidak teratur, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak layak, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsinya sebagai tempat hunian hal ini di nyatakan dalam undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kota Denpasar merupakan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia timur, dan merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara (Abbid, 2018). Kota Denpasar juga merupakan sebuah ibu kota dari sembilan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kota Denpasar sebagai ibu Kota Provinsi Bali tentu menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas perekonomian masyarakat, hal ini berdampak pada mobilitas penduduk sehingga menimbulkan tingginya laju urbanisasi dan migrasi.

Melansir data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dijelaskan bahwa sebesar 52,68 persen dari jumlah penduduk total Kota Denpasar merupakan penduduk migrasi dan urbanisasi. Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,8 km² dan jumlah penduduk sebanyak 726.3 jiwa serta

memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 5.078 jiwa/km², Dengan wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya yang merupakan salah satu daerah pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi di bandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali.

Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui Asosiasi Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar menetapkan dari 16 Kelurahan terdapat 7 kelurahan yang masih tergolong kategori kawasan kumuh dengan luasan kumuh sebesar 46,74 Ha. Kawasan sepanjang sungai dan perdagangan di Kota Denpasar merupakan salah satu faktor penyebab berkembangnya kawasan kumuh.

Tingkat kekumuhan dapat di ketahui dari fenomena yang terjadi karena ketidakteraturan tata letak bangunan yang ada di wilayah tersebut seperti di wilayah TPA Suwung Denpasar Selatan. Di sebelah kawasan tersebut terdapat permukiman kumuh yang luasnya mencapai 25,5 hektar. Lokasi ini telah direncanakan oleh pemerintah untuk di benahi. Namun, karena terbenturnya luas lahan yang cukup luas dimana luas maksimal yang ditangani pemerintah Kabupaten/Kota hanya seluas 5 hektar, maka Pemerintah Kota Denpasar tidak bisa menggarap permukiman kumuh tersebut.

Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini masih menghadapi beberapa kendala yaitu penganggaran kegiatan infrastruktur untuk skala kawasan dan lingkungan yang tidak tentu ada setiap tahunnya bagi pelaksanaan Program KOTAKU, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang terdapat di Kelurahan/Desa mengalami penurunan dari segi keaktifan karena tidak ada kegiatan infrastruktur yang didanai dari Program KOTAKU, perilaku masyarakat yang kurang peka terhadap lingkungan seperti rendahnya sifat memiliki dan akuntabilitas masyarakat untuk melestarikan serta memanfaatkan hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, meningkatkan kepercayaan publik dan swasta kepada pemerintah.

2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Evaluasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Denpasar Provinsi Bali terdapat beberapa permasalahan yang terjadi menyebabkan permukiman kumuh belum bisa di selesaikan hingga 0 % hal ini di sebabkan beberapa faktor diantaranya penduduk yang melakukan urbanisasi dari luar Denpasar dan luar Provinsi Bali, lahan sewa yang cenderung membangun rumah semi permanen yang tidak memenuhi standar rumah layak huni, tidak adanya infrastruktur jalan drainase lingkungan, pemilik lahan tidak melakukan penataan sebelum disewakan (tidak adanya aturan bagi pihak pengontrak dalam membangun rumah), pihak pemerintah tidak bisa melakukan intervensi dalam melakukan perbaikan, karena lahan tersebut merupakan milik pribadi, perilaku masyarakat yang kurang peka terhadap lingkungan dan kurangnya monitoring/pengawasan dari pihak terkait dalam pengendalian permukiman sesuai standar teknis.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Pertama penelitian Nurhasanah berjudul Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Nurhasanah, 2019), menemukan bahwa implementasi kebijakan program KOTAKU terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat terkendala bahwasanya belum semuanya terlaksana hanya beberapa kegiatan tahap pelaksanaan program ini yang sudah terencana. Kedua penelitian Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan Hartuti Purnaweni yang berjudul Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang (Sitorus, Astuti dan Purnaweni, 2020) menemukan bahwa Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang sejauh ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari tahapan persiapan, perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Ketiga penelitian Dadan Rohimat, Rita Rahmawati, G. Goris Seran yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program KOTAKU / PNPM Di Kecamatan Ciawi menemukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program KOTAKU/PNPM di Kecamatan Ciawi sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari ditemukannya hasil perhitungan indikator- partisipasi masyarakat Kecamatan Ciawi memperoleh nilai 3.72 dengan kategori Baik (Rohimat, Rahmawati, Seran, 2017). Keempat penelitian Indhar Wahyu Wira Harjo, Ayu Kusumastuti, Dewi Puspita Rahayu, Wida Ayu Puspitosari yang berjudul Indeks Keberlanjutan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Malang menemukan bahwa Indeks keberlanjutan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Bareng Kota Malang yaitu 59.174. Hal ini diartikan bahwa keberlanjutan program KOTAKU masuk dalam kategori cukup. Kategori ini mengindikasikan bahwa program ini dapat dikatakan tidak terlalu berjalan dengan baik namun juga tidak terlalu berjalan buruk/tidak baik (Harjo dkk., 2021)..

4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni evaluasi pelaksanaan program KOTAKU di Kota Denpasar Provinsi Bali berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada implementasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari William N. Dunn (2013) yang menyatakan bahwa evaluasi dapat diukur melalui 6 (enam) indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, responsifitas, ketepatan, perataan dan kecukupan.

5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1). Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Denpasar. (2). Untuk mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Denpasar. (3). Untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan untuk mengatasi masalah yang terjadi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni pengumpulan data pada suatu sumber latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang mana penulis adalah sebagai instrumen kunci, sedangkan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang digunakan dengan tujuan menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari sumber utama informasi wawancara, observasi dan survei secara langsung. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara penulis menggunakan metode wawancara semiterstruktur, karena dengan metode ini hubungan antara pewawancara dengan informan tidak kaku dan fleksibel. Harapannya data yang dikumpulkan tepat dan sesuai dengan fakta di lapangan. Penulis mendapat data primer dari informan yang telah ditentukan untuk memberikan informasi terkait Program KOTAKU. Data-data sekunder penulis dapatkan dari data dan dokumen yang

diperoleh dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan snowball sampling. Penentuan informan penulis menggunakan purposive sampling agar penulis bisa memperoleh data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, pertimbangan dilakukan untuk menentukan siapa yang paling tahu tentang apa yang ingin diketahui penulis penulis agar penulis memperoleh data yang akurat dan lengkap. Penulis juga menggunakan teknik snowball sampling, karena menulis ingin mendapatkan data atau informasi yang memuaskan. Pada penelitian ini, Langkah-langkah yang diambil atau dilakukan oleh penulis untuk menganalisis data adalah melalui penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis evaluasi pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Denpasar Provinsi Bali

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Denpasar ini dianalisis menggunakan teori Evaluasi menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas Dan Ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu unsur pokok penting dalam mencapai sasaran yang ditentukan dalam mengevaluasi capaian pelaksanaan suatu program. Hasil analisis yang diperoleh bahwa Program KOTAKU telah memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh di Kota Denpasar. Tetapi pelaksanaan program KOTAKU masih dinilai belum efektif karena masih banyak sub-indikator kumuh yang belum tuntas ditangani, bahkan ada sub-indikator yang sama sekali tidak mengalami perubahan di tahun 2022.

2. Efisiensi

Pelaksanaan kebijakan atau program dapat dikatakan efisien apabila memiliki input semaksimal mungkin, namun mampu memberikan output secara maksimal. Input yang dimaksud dalam pelaksanaan Program KOTAKU ialah pendayaan sumber pelaksana dan pendayagunaan sumber dana yang terkait dalam mencapai tujuan program. Hasil yang diperoleh bahwa dari indikator pemberdayaan sumber pelaksana yaitu aktor atau sumber daya pelaksana KOTAKU tidak sedikit mulai dari tingkat Pemerintah Kota sendiri yaitu Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan, hingga Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP), pihak Koordinator Program hingga pihak Non-ASN seperti BKM yang ada di Desa. Aktor/sumber daya pelaksana Program KOTAKU ini sudah dikatakan efisien karena semua pelaksana sudah melaksanakan tugas dengan prosedur dan fungsinya termasuk bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam melaksanakan Program KOTAKU. Selanjutnya melalui indikator pendayagunaan sumber dana yaitu tenaga secara swadaya dinilai dari dimensi efisiensi telah memberikan hasil efisien yakni penggunaan sumber dana lebih hemat dilakukan oleh masyarakat di dibandingkan oleh pihak ketiga yakni tukang/

tenaga ahli sehingga tidak perlu lagi memberikan dana tambahan kepada tukang dengan hasil yang sama yakni penanganan kumuh dapat terselesaikan sesuai apa yang ditargetkan.

3. Kecukupan

Dimensi kecukupan berkaitan dengan terselesaikannya masalah dengan adanya program melalui kriteria kecukupan dana dan waktu yang diberikan dapat mengentaskan permukiman kumuh di Kota Denpasar. Berdasarkan indikator kecukupan dana hasil yang diperoleh adalah dana yang diberikan hanya cukup untuk perbaikan saja akan tetapi tidak cukup untuk biaya pemeliharaan infrastruktur lingkungan pada suatu kawasan. Dana pemeliharaan infrastruktur tersebut sangat penting guna mencegah adanya permukiman kumuh baru. Selanjutnya berdasarkan indikator kecukupan waktu bahwa waktu yang diberikan untuk mengentaskan permukiman kumuh di Kota Denpasar belum cukup karena penanganan permukiman kumuh ini tidak bisa mutlak ditentukan akan tetapi perlu waktu yang berlanjut dan pemeliharaan dalam menjaganya agar permukiman kumuh tersebut tidak menimbulkan kawasan kumuh baru. Akan tetapi Program KOTAKU ini sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat terutama masyarakat yang dulunya tinggal di kawasan yang kumuh.

4. Perataan

Menilai Program KOTAKU telah bersifat merata, maka peneliti menentukan indikator meratanya Program KOTAKU melalui meratanya realisasi program ke seluruh sasaran Program. pelaksanaan Program KOTAKU dikatakan sudah merata ke seluruh target kawasan kumuh di Kota Denpasar, hanya saja di beberapa target sasaran program terdapat wilayah yang masih terdapat sisa kawasan kumuh. Akan tetapi secara keseluruhan program ini sudah merata terealisasi meskipun hingga saat ini masih terdapat 46,74 Ha kawasan kumuh di Kota Denpasar.

5. Responsivitas

Indikator yang menjadi acuan dalam dimensi responsivitas ialah berkurangnya keluhan masyarakat terhadap permukiman kumuh serta tanggapan yang diberikan oleh masyarakat selama Program KOTAKU ini dijalankan. Hasil yang diperoleh ialah dalam pelaksanaan Program KOTAKU keluhan masyarakat berkurang terhadap permukiman kumuh ini sudah diatasi melalui Program KOTAKU yang banyak memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam pembangunan infrastruktur permukiman kumuh serta Program KOTAKU ini merupakan program yang menguntungkan bagi masyarakat dan masyarakat menjadi sangat senang karena dapat memperbaiki infrastruktur permukiman kumuh di kawasan mereka yaitu di Kota Denpasar.

6. Ketepatan

Dimensi ketepatan peneliti fokus untuk melihat apakah realisasi program mampu mengatasi indikator kekumuhan yang terdapat pada suatu kawasan kumuh. Hasil yang diperoleh bahwa Program KOTAKU ini sudah tepat dalam pelaksanaannya yakni sudah dapat mengatasi indikator-indikator permasalahan kumuh yang ada di Kota Denpasar akan tetapi permasalahan lahan memang belum bisa banyak ditangani karena masalah kewenangan yang ditangani oleh pusat dan masalah lahan sewa milik pribadi yang ditempati.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Denpasar Provinsi Bali

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar adalah sebagai berikut : (1). Adanya dasar hukum dan peraturan, (2). Adanya kerjasama atau kolaborasi antar pihak , (3). Adanya pelaksanaan sosialisasi kegiatan, (3). Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, (4). Adanya dukungan swadaya dari masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar adalah sebagai berikut : (1). Status Lahan pada Kawasan Kumuh yang ada di Lahan Sewa, (2). Belum Adanya Kesadaran dari Pemilik Lahan untuk Menjaga Lingkungannya, (3). Kurangnya Partisipasi Pihak Non-Pemerintah (Swasta), (4). Terbatasnya Anggaran

3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar dalam menghadapi hambatan yang ada adalah sebagai berikut: (1). Membuat regulasi tentang penanganan permukiman kumuh di lahan sewa, (2). Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Kepada Warga yang Berada di Lahan Sewa, (3). Meningkatkan Kerjasama Antar Pihak, (4). Mengoptimalkan Anggaran yang Ada

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar telah terlaksana mulai dai tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 sekarang, akan tetapi masih terdapat permukiman kumuh di Kota Denpasar. Oleh karena itu Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar diteliti dengan fokus terhadap kriteria evaluasi kebijakan yaitu mengevaluasi pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar Provinsi Bali.

Penulis menemukan temuan penting yakni Program KOTAKU di Kota Denpasar ini sudah memberikan hasil yang baik serta menguntungkan bagi masyarakat Kota Denpasar terhadap penanganan permukiman kumuh dari luas permukiman kumuh di Kota Denpasar tahun 2016 yang semulanya seluas 184,045 Ha dan hingga tahun 2023 menjadi 46,74 Ha yang mengalami penurunan setiap tahunnya membuktikan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar tela berjalan dengan baik meskipun masih ada indikator yang belum ditangani.

Temuan penting yang dimaksudkan ialah melalui indikator permukiman kumuh yang sulit dan belum bisa tertangani oleh pemerintah Kota Denpasar yaitu adanya penduduk yang bermukim di lahan sewa milik pribadi sehingga pemda tidak memiliki kewenangan untuk mengatasi hal tersebut karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dikarenakan juga luas permukiman kumuh tersebut lebih dari 15 Ha.

Layaknya program lainnya, Program KOTAKU di Kota Denpasar masih memiliki kekurangan yakni belum adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat berupa bantuan dana maupun kerja sama dari pihak swasta yang masih minim, dari tahun 2016 hanya ada satu bantuan dana dari pemerintah pusat yakni pada tahun 2019 dan satu bantuan dari pihak swasta berupa cat untuk pembangunan infrastruktur kumuh yang ada di gang pudak, desa bung kaja , denpasar utara. Adanya program ini juga diharapkan secara jangka berkala mampu mengurangi lingkungan kumuh serta memelihara permukiman yang layak huni di lingkungan Kota Denpasar agar target pelaksanaan Program KOTAKU ini yaitu 0% Kumuh bisa terealisasikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dengan menggunakan teori evaluasi melalui fakta-fakta teori yang sudah dianalisis sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari evaluasi pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar yang dinilai dengan menggunakan teori Evaluasi Kebijakan menurut William N. Dunn (2013) yaitu : Efektivitas diukur melalui indikator capaian/target pelaksanaan Program KOTAKU, hasil yang diperoleh pelaksanaan program KOTAKU masih dinilai belum efektif. Efisiensi diukur melalui indikator efisiensi sumber daya pelaksana dan efisiensi sumber daya dana yang dinilai sudah efisien. Kecukupan diukur melalui indikator kecukupan dana dan kecukupan waktu yang dinilai belum berjalan dengan baik. Responsivitas dinilai sudah mencapai hasil yang baik karena 2 (dua) indikator ini dinilai sudah berhasil dan mendapat respon baik dari masyarakat. Ketepatan diukur melalui indikator realisasi program dapat mengatasi indikator kekumuhan yang dinilai sudah mencapai hasil yang baik. Perataan berdasarkan indikator meratanya realisasi program ke seluruh sasaran program yang dinilai sudah berjalan dengan baik dan merata. Dengan demikian, dari 9 (sembilan) indikator terdapat 6 (enam) indikator yang sudah berhasil dalam pencapaian tujuannya sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya belum berjalan dengan baik.
2. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar.
 - a. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :
 - 1) Adanya dasar hukum dan peraturan
 - 2) Adanya kerjasama atau kolaborasi antar pihak
 - 3) Adanya pelaksanaan sosialisasi kegiatan
 - 4) Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
 - 5) Adanya dukungan swadaya dari masyarakat
 - b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :
 - 1) Status Lahan pada Kawasan Kumuh yang ada di Lahan Sewa
 - 2) Belum Adanya Kesadaran dari Pemilik Lahan untuk Menjaga Lingkungannya
 - 3) Kurangnya Partisipasi Pihak Non-Pemerintah (Swasta)
 - 4) Terbatasnya Anggaran
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar dalam menghadapi hambatan yang ada adalah sebagai berikut:
 - 1) Membuat regulasi tentang penanganan permukiman kumuh di lahan sewa
 - 2) Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Kepada Warga yang Berada di Lahan Sewa
 - 3) Meningkatkan Kerjasama Antar Pihak
 - 4) Mengoptimalkan Anggaran yang Ada

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studikusus.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan program KOTAKU di Kota Denpasar Provinsi Bali untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Kota Denpasar dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar serta masyarakat Kota Denpasar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan peneliti

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*. Jakarta Selatan.

_____. (2021). *Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2026*. Diakses pada 20 September 2022.

_____. (2022). *Dokumen Pencapaian Pengurangan Kumuh Kota Denpasar*. Diakses pada 21 Januari 2023

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. JURNAL

Dadan Rohimat, R. R. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU /. *Jurnal Governansi*, Vol.3. Diakses pada tanggal 3 September 2022

Herta Sitorus, R. S. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU). *Jurnal Administrasi Negara*, Halaman 74-94. Diakses pada tanggal 20 September 2022

Indhar Wahyu Wira Harjo, A. K. (2021). INDEKS KEBERLANJUTAN PROGRAM KOTAKU. *Jurnal Pengembangan Kota*, Halaman 50-63. Diakses pada tanggal 3 September 2022

Nurhasanah. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH). *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, Halaman 58-70. Diakses pada tanggal 3 September 2022

4. SUMBER INTERNET

https://bali.bps.go.id/indicator/12/28/1/proyeksi-penduduk_provinsi-bali-menurut-jenis-kelamin.html. *Data jumlah penduduk Provinsi Bali*. Minggu, 2 Oktober 2022.

https://bali.bps.go.id/indicator/12/28/1/proyeksi-penduduk_provinsi-bali.html. *Proyeksi data penduduk provinsi bali*. Selasa, 27 September 2022

umuh, Denpasar Terkendala Sejumlah Hal. Kamis, 22 September 2022

<https://www.perkim.denpasarkota.go.id/search>

Diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 09.11 WIB

<https://data.pu.go.id/>. *Data Statistik. Rabu, 5 Oktober 2022*

<https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>). *Data Jumlah Penduduk di Indonesia. Kamis, 13 Oktober 2022*

